



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER

LAPORAN EVALUASI RENJA TRIWULAN IV

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV ini merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban kepada Pedoman Evaluasi Rencana Kerja dan mandate untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser termasuk peran serta Non ASN yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Paser pada umumnya.

Demikian Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini disusun sebagai instrument dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolak ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana kegiatan, evaluasi hasil akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, Januari 2026
Sekretaris Daerah,



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Maksud dan Tujuan Laporan	
A.1. Maksud Laporan	4
A.2. Tujuan Laporan	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8
D. Isu Strategis	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : CAPAIAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN	
A. Anggaran Belanja Kegiatan	11
B. Realisasi anggaran	12
BAB III : EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA SETDA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Faktor Penghambat	22
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Saran – Saran	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, khususnya pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
2. untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap hasil yang direncanakan.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
4. Menemukan alternatif pemecahan masalah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang akan dilaksanakan pada triwulan atau semester berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan Renja dapat dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja selanjutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah:

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. Penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser terdiri dari:

- a. *Sekretaris Daerah;*
- b. *Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :*
 1. *Bagian Tata Pemerintahan*
 2. *Bagian Kesejahteraan Rakyat*
 3. *Bagian Hukum*
 4. *Bagian Kerja Sama*
- c. *Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :*
 1. *Bagian Perekonomian*
 2. *Bagian Administrasi Pembangunan*
 3. *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
 4. *Bagian Sumber Daya Alam*

d. Asisten Administrasi Umum yang membawahi :

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASERP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASERP


ANDI AZIS
NIP 19680816 199603 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAMI FADLI

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan *perumusan perencanaan yang berkualitas*. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam *Penunjang Urusan Pemerintahan*.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, dan akar masalah, serta hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel I
Tabel Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Ketidak jelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, Badan, Bagian dan ketersediaan sumber daya aparatur. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.
2	Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional.	Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan atau ketersediaan sumber daya aparatur serta Pelayanan yang belum memahami SOP akan menghasilkan kerja yang kurang baik secara vertikal maupun horizontal, dan kurang kemampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan / tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas

		tersebut kepada pejabat lain yang dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya.
--	--	--

Sumber : RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022-2026

D. ISU STRATEGIS

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai PD yang mempunyai tugas pokok *melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*UNRESOLVED MATTERS*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akandatang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD (Focus Grup Discussion) atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser *adalah **Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dan **Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional***.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata

Pengantar;

Daftar Isi;

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Capaian Target Penyerapan Anggaran Kegiatan

Menjelaskan tentang Capaian target kinerja penyerapan APBD Pada lingkup Sekretariat kabupaten paser;

Bab III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Menjelaskan tentang hasil Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Setda Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 terhadap Hasil kinerja perangkat daerah dan hambatan/kendala dalam pencapaian target kerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan Kesimpulan dan Saran.

BAB II**CAPAIAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN****A. Anggaran Belanja Kegiatan**

Belanja daerah tahun anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar Rp. 193.274.133.768,-.

Tabel 2.1
Uraian Anggaran Belanja Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Paser

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
	SEKRETARIAT DAERAH		193.274.133.768
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		48.335.617.244
		1 Administrasi Tata Pemerintahan	4.087.549.096
		2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.271.372.590
		3 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.216.127.323
		4 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	760.568.235
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		6.418.242.622
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.030.975.560
		2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.002.057.691
		3 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	993.461.644
		4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.391.747.727
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		138.520.273.902
		1 Penataan Organisasi	1.555.961.240
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	995.240.000
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.613.116.514
		4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.066.468.395
		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.699.150.600
		6 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.531.676.000
		7 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.745.677.960
		8 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.484.011.895
		9 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	809.265.822
		10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.012.239.788
		11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.007.465.688

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 178.585.218.584,-** atau sebesar **92,40%** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 193.274.133.768,-**. Dengan demikian dapat dikatakan pada **Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 terdapat sisa pagu anggaran pada** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 14.688.915.184,-**.

Penyerapan anggaran pada triwulan IV ini sebesar 92,40% atau hampir mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak terealisasi sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat terserap untuk kegiatan tersebut. Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Triwulan IV Tahun 2025 dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
Triwulan IV Tahun Anggaran 2025**

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI S/D TRIWULAN IV KEUANGAN 2025	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
	Sekretariat Daerah	Rp 193.274.133.768	Rp 178.585.218.584	92,50%	Rp 14.688.915.184
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 3.030.975.560	Rp 2.786.909.301	91,95%	Rp 244.066.259
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 1.002.057.691	Rp 997.801.582	99,58%	Rp 4.256.109
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 993.461.644	Rp 854.867.446	86,05%	Rp 138.594.198
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 1.391.747.727	Rp 1.255.337.689	90,20%	Rp 136.410.038
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 4.087.549.096	Rp 4.020.755.206	98,37%	Rp 66.793.890
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 3.271.372.590	Rp 3.151.258.533	96,33%	Rp 120.114.057
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 40.216.127.323	Rp 37.675.642.594	93,68%	Rp 2.540.484.729
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 760.568.235	Rp 754.063.174	99,14%	Rp 6.505.061
	Penataan Organisasi	Rp 1.555.961.240	Rp 1.437.970.327	92,42%	Rp 117.990.913
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 995.240.000	Rp 910.289.512	91,46%	Rp 84.950.488
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 30.613.116.514	Rp 28.069.520.235	91,69%	Rp 2.543.596.279
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31.066.468.395	Rp 28.422.613.849	91,49%	Rp 2.643.854.546
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 15.699.150.600	Rp 15.000.025.681	95,55%	Rp 699.124.919
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 5.745.677.960	Rp 5.065.139.005	88,16%	Rp 680.538.955
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2.539.141.688	Rp 1.784.693.203	70,28%	Rp 754.448.485
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 5.484.011.895	Rp 5.473.952.638	99,82%	Rp 10.059.257
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp 809.265.822	Rp 799.135.559	98,75%	Rp 10.130.263

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI S/D TRIWULAN IV KEUANGAN 2025	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
	Kinerja Perangkat Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 44.012.239.788	Rp 39.176.382.633	91,22%	Rp 3.772.919.109

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab IV mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja Untuk Triwulan IV

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 40\%$	Tidak Berhasil	Merah

1. REALISASI KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Sekretariat Daerah, Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2025 indikator kinerja sasaran kegiatan beserta targetnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100 %
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100 %
9	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100 %
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %
11	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100 %
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100 %
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100 %
14	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100 %
15	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100 %
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100 %
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100 %
18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran S/D Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2025		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Sekretariat Daerah			100%	193.274.133.768	118,49%	178.585.218.584	118,49%	92,40%	14.688.915.184
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	6.418.242.622	100,83%	5.894.916.018	100,83%	91,85%	523.326.604
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100	3.030.975.560	129,77%	2.786.909.301	129,77%	91,95%	244.066.259
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	1.002.057.691	93,75%	997.801.582	93,75%	99,58%	4.256.109
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100	993.461.644	80,56%	854.867.446	80,55%	86,05%	138.594.198
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	1.391.747.727	99,26%	1.255.337.689	99,26%	90,20%	136.410.038
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti 2. Nilai LPPD	100 2,75	48.335.617.244	136,77%	45.601.719.507	136,77%	94,34%	2.733.897.737
	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan	100	4.087.549.096	100%	4.020.755.206	100%	98,37%	66.793.890

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2025		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Kewilayahan yang terfasilitasi							
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	3.271.372.590	285,23%	3.151.258.533	285,23%	96,33%	120.114.057
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	40.216.127.323	57,85%	37.675.642.594	57,85%	93,68%	2.540.484.729
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100	760.568.235	104%	754.063.174	104%	99,14%	6.505.061
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	138.520.273.902	76,96	127.088.583.059	76,96	91,75%	11.431.690.843
	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	1.555.961.240	100%	1.437.970.327	100%	92,42%	117.990.913
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	995.240.000	83,89%	910.289.512	83,89%	91,46%	84.950.488
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	30.613.116.514	70,74%	28.069.520.235	70,74%	91,69%	2.543.596.279
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	31.066.468.395	164,44%	28.422.613.849	164,44%	91,49%	2.643.854.546

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2025		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		yang terpenuhi							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	15.699.150.600	306,11%	15.000.025.681	306,11%	95,55%	699.124.919
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	5.745.677.960	88,89%	5.065.139.005	88,89%	88,16%	680.538.955
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100	2.539.141.688	181,19%	1.784.693.203	181,19%	70,28%	754.448.485
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	5.484.011.895	100%	5.473.952.638	100%	99,82%	10.059.257
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	809.265.822	100%	799.135.559	100%	98,75%	10.130.263
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan PD	100	44.012.239.788	78,73%	40.125.243.050	78,73%	91,22%	3.886.996.738

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja sebagaimana tersaji pada table 3.3 dapat dinyatakan bahwa capaian realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan IV Tahun 2025 dinyatakan **“Berhasil”** dengan nilai capaian realisasi kinerja sebesar **118,49%**.

B. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Hambatan dan kendala dalam capaian target kinerja yang telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa factor pendorong dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut. Adapun faktor pendorongnya adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen Pimpinan : Adanya asistensi yang intensif dari pimpinan dalam mengawal implementasi SAKIP sehingga nilai AKIP meningkat ke predikat yang lebih baik.
- b. Koordinasi yang solid : keberhasilan bidang yang realisasinya 100% menunjukan sinergi antar unit kerja dalam menindaklanjuti kebijakan daerah sudah berjalan sangat efektif.
- c. Digitalisasi Administrasi : penggunaan sistem informasi dalam layanan administrasi umum mendorong peningkatan indeks kepuasan karena proses menjadi lebih cepat dan transparan.

Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan aturan : sering adanya perubahan regulasi dari pusat yang membuat tim di daerah harus mendesain ulang rencana kerja.
- b. Waktu yang terbatas : banyaknya agenda kegiatan yang bersamaan sehingga beberapa tindak lanjut kebijakan sedikit terlambat.
- c. Sarana pendukung : masih perlunya perbaikan pada sistem data digital agar pengolahan informasi bisa lebih cepat lagi
- d. Revisi target kinerja dengan penyesuaian permintaan/kebutuhan tidak terlaksana

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2025, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 – 2026.

Dari hasil analisis capaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis kegiatan berada pada kategori **Berhasil dengan** nilai rata – rata **118,49%**.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.178.585.218.584,- atau sebesar 92,40%** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 193.274.133.768,-**. Dengan demikian dapat dikatakan pada **Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 terdapat sisa pagu anggaran pada** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 14.688.915.184,-**.
3. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025 masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian realisasi Program dan Kegiatan, namun demikian secara umum Program dan Kegiatan berhasil dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. SARAN-SARAN

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi serta mengacu pada hasil pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran, maka disampaikan beberapa saran sebagai alternatif solusi sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan update tentang aturan dari pusat agar tidak menjadi kendala dalam pencapaian target kegiatan .
2. Perlunya penyesuaian agenda rapat fasilitasi/koordinasi dengan agenda pimpinan daerah agar kegiatan kegiatan dapat terlaksana dengan tepat waktu .
3. Berkordinasi dengan Bagian Umum untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang tidak atau belum tersedia dan kerjasama dengan pihak ketiga guna perbaikan sistem data digital yang digunakan untuk percepatan pengolahan informasi.
4. Melaksanakan perubahan target kinerja di SIPD bagi kegiatan yang targetnya dirasa sulit tercapai melalui kordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampal dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat	80	325.411.128.160	72	Rp299.616.265.611	70	Rp138.520.273.902	76,89	Rp 14.900.748.390	76,96	Rp 30.390.429.459	77,05	Rp 24.793.429.359	88,69	Rp 57.003.975.951	88,69	Rp127.088.583.059	80	Rp 426.704.848.670	100,43%	189,30%	Bagian Perencanaan & Keuangan
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan,penganggaran arjdan evaluasi kinerja	100	496.202.614	100	Rp 874.434.732	100	Rp 809.265.823	13	Rp 106.279.390	49	Rp 123.228.200	16	Rp 160.970.400	22	Rp 408.657.569	100	Rp 799.135.559	200,00	Rp 1.673.570.291	200,00%	337,28%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	223.533.100	12	588.716.149	9	Rp 630.532.601	2	Rp 97.779.390	2	Rp 68.397.400	2	Rp 143.103.200	3	Rp 315.742.369	9	Rp 625.022.359	21	Rp 1.213.738.508	70,00%	542,98%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	83.125.000	24	122.801.584	12	Rp 92.843.692	0	Rp -	12	Rp 48.162.300	0	Rp -	0	Rp 42.044.600	12	Rp 90.206.900,00	36	Rp 213.008.484	60,00%	256,25%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	25	189.544.514	10	162.916.999	12	Rp 85.889.529	2	Rp 8.500.000	3	Rp 6.668.500	3	Rp 12.867.200	4	Rp 50.870.600	12	Rp 81.906.300,00	22	Rp 246.823.299	88,00%	190,22%	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	136.417.508.635	335,89	Rp 60.284.063.830	100	Rp 44.012.399.788	13,31	Rp727.714.863.735	44	Rp 15.321.625.400	26,5	Rp 9.127.705.137	21,9	Rp 7.961.048.278	105,71	Rp 40.125.243.050	341,60	Rp 100.409.306.880	341,60%	73,60%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11340	134.073.726.614	4.388	58.817.932.696	4284	Rp 42.949.301.742	715	Rp 7.372.485.175	780	Rp 15.112.004.311	918	Rp 8.972.954.849	960	Rp 7.718.938.298	3373	Rp 39.176.382.633	7761	Rp 97.994.315.319	68,44%	73,09%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/trivulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/trivulan/semesteran SKPD	60	259.145.752	12	48.206.900	12	Rp 174.153.189	3	Rp 26.097.900	4	Rp 64.375.521	3	Rp 69.222.493	3	Rp 13.220.000	12	Rp 319.192.800	24	Rp 377.399.700	40,00%	145,63%	
		Pelaksanaan Pemata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pematausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3625	2.259.145.752	979	1.381.084.954	725	Rp 865.746.806	84	Rp 316.280.660	354	Rp 145.245.568	433	Rp 84.986.160	498	Rp 206.689.280	1369	Rp 753.201.668	2.348	Rp 2.134.286.622	64,77%	94,47%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	84.636.269	4	36.839.280	2	Rp 23.038.051	0	Rp -	2	Rp -	0	Rp 541.635	0	Rp 22.201.200	2	Rp 22.742.835	6	Rp 59.582.115	60,00%	70,40%	
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	5.373.354.076	73	Rp 2.643.702.827	100	Rp 2.539.141.688	29,87	Rp223.860.736	58,21	Rp 424.439.401	52,81	Rp 374.264.763	40,3	Rp 762.128.303	181,19	Rp 1.784.693.203	254,32	Rp 4.428.396.030	254,32%	82,41%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140	1.483.388.698	56	342.229.335	28	Rp 407.465.688	6	Rp 49.645.736	6	Rp 101.533.645	6	Rp 36.440.797	6	Rp 36.511.993	24	Rp 224.152.171	80	Rp 566.381.506	57,14%	38,18%	
		Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50	326.333.015	18	1.075.234.606	10	Rp 1.231.676.000	3	Rp 117.715.000	2	Rp 69.009.402	3	Rp 98.383.500	3	Rp 647.996.898	11	Rp 933.104.800	Rp19	Rp 2.008.339.400	38,00%	615,43%	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40	1.018.180.675	4	77.718.892	8	Rp 300.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 21.449.000		Rp 5.987.232	1	Rp 27.436.232	5	Rp 105.195.124	12,50%	10,33%	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	2.545.451.688	25	1.148.520.000	12	Rp 600.000.000	1	Rp 56.500.000	9	Rp 253.876.354	5	Rp 217.991.466	2	Rp 71.632.180	17	Rp 600.000.000	42	Rp 1.748.520.000	70,00%	68,69%	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Terbit Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	100	228.515.634	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15	224.651.284	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	1.032.027.932	83,36	Rp 513.840.261	100	Rp 995.240.000	12,5	Rp35.915.809	12,5	Rp 65.384.000	12,5	Rp 184.651.800	46,39	Rp 624.337.903	83,89	Rp 910.289.512	167,25	Rp 1.424.129.773	167,25%	137,99%	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500	714.966.470	233	339.276.590	12	Rp 584.240.000	3	Rp 35.915.809	3	Rp 65.384.000	3	Rp 184.651.800	3	Rp 273.758.486	12	Rp 559.710.095	245	Rp 899.486.685	49,00%	125,81%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900	317.061.462	131	174.063.671	180	Rp 411.000.000	0	Rp -	0	Rp -	-	0	Rp -	-	Rp 350.579.417	122	Rp 350.579.417	253	Rp 524.643.088	28,11%	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	30.072.791.472	81,08	Rp 62.763.078.153	100	Rp 30.613.116.514	9,44	Rp 2.117.465.378	15,06	Rp 5.090.087.979	23,58	Rp 5.310.333.267	22,66	Rp 15.551.633.611	70,74	Rp 28.069.520.335	151,82	Rp 90.832.598.388	151,82%	302,04%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80	445.504.954	33	625.807.900	16	Rp 172.385.543	1	Rp 14.907.300	2	Rp 39.058.700	3	Rp 29.015.700	3	Rp 79.396.100	9	Rp 162.377.800	41	Rp 788.185.700	51,25%	176,93%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85	1.553.725.383	34	28.694.809.224	17	Rp 10.306.279.028	4	Rp 167.727.038	6	Rp 2.120.661.709	8	Rp 1.283.991.500	6	Rp 5.803.944.435	24	Rp 9.376.324.672	58	Rp 38.071.133.896	68,24%	249,031%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125	2.600.050.608	43	1.276.654.789	25	Rp 1.100.000.000	2	Rp 56.000.700	4	Rp 108.293.381	6	Rp 114.622.800	8	Rp 697.171.208	20	Rp 976.088.089	63	Rp 2.252.742.878	50,40%	86,64%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	6.340.926.227	35	877.602.550	30	Rp 582.027.522	0	Rp -	2	Rp 57.559.500	4	Rp 42.624.300	2	Rp 417.313.050	8	Rp 517.496.850	43	Rp 1.395.099.500	28,67%	22,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45	239.314.204	32	107.672.300	9	Rp 85.094.930	0	Rp -	2	Rp 21.875.000	2	Rp 62.980.000	4	Rp 84.855.000	36	Rp 192.527.300	80,00%	80,45%		
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	750	5.123.930.102	300	20.952.659.513	150	Rp 12.802.218.465	5	Rp 1.235.539.772	15	Rp 1.996.192.143	22	Rp 2.696.345.701	28	Rp 5.844.029.301	70	Rp 11.772.097.917	370	Rp 32.724.757.430	49,33%	638,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	13.219.472.430	300	10.081.185.777	12	Rp 5.560.210.997	3	Rp 643.299.568	3	Rp 768.322.546	3	Rp 1.121.858.266	3	Rp 2.646.799.527	12	Rp 5.180.279.907	312	Rp 15.261.465.684	41,60%	115,45%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	549.817.585	12	146.686.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 146.686.000	20,00%	26,68%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	510.203.218	-	Rp 777.220.400	100	Rp -	0	Rp 0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	-	Rp 777.220.400	0,00%	152,34%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60	510.203.218	12	777.220.400	0	Rp -	0	Rp 0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	-	Rp 777.220.400	30,00%	152,34%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	16.907.786.107	75	Rp 116.744.596.578	100	Rp 31.066.468.395	41,11	Rp 2.224.531.313	36,67	Rp 5.401.730.083	43,33	Rp 6.542.104.029	43,33	Rp 14.254.248.424	164,44	Rp 28.422.613.849	239,44	Rp 145.167.210.427	239,44%	858,58%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	5600	50.909.034	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	9.896.492.161	24	5.147.635.985	12	Rp 5.723.157.699	6	Rp 780.107.939	3	Rp 806.737.393	3	Rp 876.730.152	3	Rp 1.007.221.614	15	Rp 3.470.797.098	39	Rp 8.618.433.083	65,00%	87,09%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	6.960.384.932	20	96.219.594.593	5	Rp 15.654.416.940	2	Rp 113.146.800	3	Rp 2.175.346.800	4	Rp 3.245.737.987	4	Rp 9.737.685.164	13	Rp 15.271.906.751	33	Rp 111.491.501.344	132,00%	1601,80%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tidak ada didalam renstra	-	-	15.377.366.000	12	Rp 9.688.893.756	4	Rp 1.331.276.574	3	Rp 2.419.645.890	3	Rp 2.419.645.890	3	Rp 3.509.341.646	13	Rp 9.679.910.000	37	Rp 35.057.276.000	#VALUE!	#DIV/0!
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	11.274.732.231	221,11	Rp 34.835.320.490	100	Rp 15.699.150.600	82,28	Rp 801.442.600	63,88	Rp 1.544.864.288	87,28	Rp 1.534.127.200	71,67	Rp 11.119.591.593	306,11	Rp 15.000.025.681	527,22	Rp 49.833.346.171	527,22%	442,01%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	1.823.714.316	23	1.497.010.134	3	Rp 948.735.600	3	Rp 96.603.600	2	Rp 87.342.400	3	Rp 228.552.500	3	Rp 343.192.950	11	Rp 755.691.450	34	Rp 2.252.701.584	226,67%	123,52%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	100	5.010.110.738	49	2.832.672.926	20	Rp 1.258.128.950	3	Rp 176.404.600	5	Rp 198.143.908	6	Rp 276.950.600	3	Rp 431.235.312	17	Rp 1.082.734.420	66	Rp 3.915.407.346	66,00%	78,15%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	15	4.440.907.127	9	30.505.637.430	3	Rp 13.492.286.050	4	Rp 528.434.400	3	Rp 1.259.377.980	4	Rp 1.028.624.100	3	Rp 10.345.163.331	14	Rp 13.161.599.811	23	Rp 43.667.237.241	153,33%	983,30%
Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	10.691.735.857	97	Rp 5.155.519.673	100	Rp 5.745.677.960	25	Rp 375.770.380	19,45	Rp 1.496.360.035	19,44	Rp 1.035.342.444	25	Rp 2.157.460.146	88,89	Rp 5.065.139.005	186	Rp 10.220.658.678	186,11%	95,59%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60	3.962.658.387	25	2.590.017.167	12	Rp 2.654.410.650	5	Rp 342.766.800	3	Rp 664.518.695	3	Rp 475.505.775	3	Rp 700.263.973	14	Rp 2.183.555.243	39	Rp 4.773.529.410	65,00%	120,46%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	3.314.336.933	24	1.978.452.731	12	Rp 2.491.262.310	3	Rp 10.389.100	3	Rp 711.220.860	3	Rp 472.029.149	3	Rp 1.181.028.033	12	Rp 3.374.662.142	36	Rp 4.353.119.873	60,00%	131,34%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60	1.787.065.921	22	587.049.775	12	Rp 600.000.000	1	Rp 22.620.480	1	Rp 120.820.480	1	Rp 87.807.520	3	Rp 275.668.140	6	Rp 506.916.620	28	Rp 1.093.966.395	46,67%	61,22%
PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	4.040.714.299	100	3.153.461.283	100	Rp 1.555.961.240	13,57	Rp 198.105.899	15	Rp 110.525.635	28,57	Rp 135.107.319	42,86	Rp 994.231.474	100	Rp 1.437.970.327	200	Rp 4.591.431.610	200,00%	113,62%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	205	1.302.098.320	82	1.195.295.144	12	Rp 696.111.541	3	Rp 71.156.104	3	Rp 29.533.200	2	Rp 37.805.400	4	Rp 536.619.786	12	Rp 675.114.490	94	Rp 1.870.409.634	45,85%	143,65%
Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	1.262.318.147	8	748.459.201	7	Rp 319.797.000	3	Rp 49.730.545	0	Rp 41.106.355	3	Rp 38.455.100	1	Rp 132.075.768	7	Rp 261.362.768	15	Rp 1.009.826.969	75,00%	80,00%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	681.748.835	4	759.248.072	2	Rp 378.741.699	0	Rp 52.596.632	1	Rp 7.725.880	0	Rp 18.789.340	1	Rp 273.009.622	2	Rp 352.121.479	6	Rp 1.111.369.552	60,00%	163,02%
Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	184.193.054	2	119.287.230	2	Rp 48.712.000	0	Rp -	0	Rp 2.550.000	1	Rp 12.546.000	1	Rp 28.111.600	2	Rp 43.207.600	4	Rp 162.494.830	80,00%	88,22%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	610.356.043	6	331.171.935	3	Rp 112.599.000	0	Rp 24.622.618	0	Rp 29.610.200	1	Rp 27.511.479	2	Rp 24.414.693	3	Rp 106.158.990	9	Rp 437.330.625	60,00%	71,65%

Bagian Umum

Bagian Organisasi

2	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	8.365.555.485	100	11.871.027.384	100	Rp5.484.011.895	25	Rp 1.102.507.150	25	Rp 811.984.438	25	Rp 388.822.900	25	Rp 3.170.638.150	100	Rp 5.473.952.638	200	Rp 17.344.980.022	200,00%	207,34%	Bagian Protokol
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana	60	3.506.165.782	24	4.830.964.358	12	Rp 2.743.837.783	3	Rp 485.862.000	3	Rp 398.381.800	3	Rp 219.858.400	3	Rp 1.638.987.100	12	Rp 2.743.089.300	36	Rp 7.574.053.658	60,00%	216,02%	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	180	2.449.029.978	48	2.721.498.349	12	Rp 1.451.194.013	3	Rp 267.953.400	3	Rp 158.207.600	3	Rp 77.388.000	3	Rp 945.452.500	12	Rp 1.449.001.500	60	Rp 4.170.499.849	33,33%	170,29%	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan	60	2.410.359.725	24	4.318.564.677	12	Rp 1.288.980.099	3	Rp 348.691.750	3	Rp 255.395.038	3	Rp 91.576.500	3	Rp 586.198.550	12	Rp 1.281.861.838	36	Rp 5.600.426.515	60,00%	232,35%	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	140.592.769.988	106,37	Rp64.227.543.065	100	Rp113.098.617.244	25	Rp1.330.454.736	25	Rp 11.299.194.130	25	Rp 14.870.633.060	25	Rp 18.101.437.581	100	Rp 45.601.719.507	206,37	Rp 109.829.262.572	206,37%	78,12%	Bagian Tata Pemerintahan
			Nilai LPPD	3,33		2,77		2,75		0		0		0	2,78		2,78		5,55					
		Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	1.147.638.721	100	6.444.348.724	100	Rp 4.087.549.096	52,3	Rp 272.790.204	12,5	Rp 391.281.341	23,6	Rp 771.717.555	11,6	Rp 2.584.966.106	100	Rp 4.020.755.206	200	Rp 10.465.103.930	200,00%	911,88%	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	115	279.300.593	0	4.005.363.344	8	Rp 1.993.939.180	1	Rp 84.733.138	3	Rp 95.753.800	3	Rp 612.224.800	1	Rp 1.197.585.246	8	Rp 1.990.296.984	0	Rp 5.995.660.328	0,00%	2146,67%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45	382.556.698	0	1.389.206.784	9	Rp 591.303.175	4	Rp 65.273.276	0	Rp 104.995.458	3	Rp 86.341.800	2	Rp 329.703.660	9	Rp 586.314.194	0	Rp 1.975.520.978	0,00%	516,40%	Bagian Hukum
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	466.374.604	0	1.049.778.596	3	Rp 1.502.306.741	3	Rp 122.783.790	0	Rp 190.532.083	0	Rp 73.150.955	0	Rp 1.057.677.200	3	Rp 1.444.144.028	0	Rp 2.493.922.624	0,00%	534,75%	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	2.443.421.838	142,16	4.119.375.267	100	Rp 3.271.372.590	15,88	Rp67.833.280	29,46	Rp 180.022.586	88,67	Rp 368.014.268	151,2	Rp 2.535.388.399	285,23	Rp 3.151.258.533	427,39	Rp 7.270.633.800	427,39%	297,56%	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3750	840.719.420	2022	1.219.052.888	850	Rp 583.166.634	201	Rp 31.782.580	230	Rp 88.294.172	323	Rp 232.958.040	286	Rp 216.259.500	1040	Rp 569.294.292	3062	Rp 1.788.347.180	81,65%	212,72%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	21	999.838.150	7	2.500.165.680	3	Rp 2.431.135.984	0	Rp 16.199.900	1	Rp 28.108.780	6	Rp 91.973.500	12	Rp 2.189.469.476	19	Rp 2.325.751.656	26	Rp 4.825.917.336	123,81%	482,67%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4370	602.864.269	194	400.156.699	100	Rp 257.069.972	24	Rp 19.850.800	28	Rp 63.619.634	28	Rp 43.082.728	20	Rp 129.659.423	100	Rp 256.212.585	294	Rp 656.369.284	6,73%	108,88%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	135.673.694.847	100	52.613.008.957	100	Rp 104.979.127.323	10,48	Rp 935.386.956	23,89	Rp 10.641.483.103	23,48	Rp 13.557.935.128	0	Rp 12.540.837.407	57,85	Rp 37.675.642.594	157,85	Rp 90.288.651.551	157,85%	66,55%	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1785	20.674.670.340	630	34.355.984.181	180	Rp 32.766.531.597	20	Rp 833.122.156	54	Rp 10.476.832.780	17	Rp 10.349.178.890	0	Rp 8.710.632.424	91	Rp 30.369.766.250	721	Rp 64.725.750.431	40,39%	313,07%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	500	25.882.458.007	196	17.192.456.398	100	Rp 71.958.484.105	7	Rp 26.304.800	15	Rp 131.500.323	41	Rp 3.173.888.238	0	Rp 3.779.180.983	63	Rp 7.110.874.344	259	Rp 24.303.330.742	51,80%	93,90%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	75	1.210.097.476	35	1.064.568.378	15	Rp 254.111.621	2	Rp 75.960.000	4	Rp 33.150.000	3	Rp 34.868.000	0	Rp 51.024.000	9	Rp 195.002.000	44	Rp 1.259.570.378	58,67%	104,09%	

[illegible]